

KAJIAN MASTER PLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PANGKALPINANG

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami permasalahan kemiskinan yang sama dengan kota lainnya. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Pangkalpinang dalam menekan angka kemiskinan. Namun upaya pemerintah tersebut masih belum menghasilkan hasil yang optimal, hal ini terlihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2017 sampai 2021 yang masih tergolong cukup fluktuatif. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 10,27 ribu jiwa atau sebesar 4,95 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang, sedangkan posisi jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 ribu jiwa atau sebesar 4,25 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat pada Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula sebanyak 9,40 ribu jiwa di Tahun 2020 naik menjadi 10.10 ribu jiwa, kenaikan mencapai 700 ribu jiwa.

Berdasarkan latar belakang tujuan dari penyusunan kajian ini untuk menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Pangkalpinang, memetakan permasalahan, potensi dan peluang dan ancaman penanggulangan kemiskinan di Kota Pangkalpinang, strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Pangkalpinang dan peta kondisi kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Metode kajian yang digunakan adalah survei lapangan dengan wawancara dan pengisian kuisioner kepada responden, kemudian untuk menambah analisis dilakukan studi pustaka dan dokumentasi. Jumlah sampel yang disurvei sebanyak 100 Kepala Keluarga yang terdaftar di DTKS Kota Pangkalpinang dan tersebar di 7 kecamatan Kota Pangkalpinang, dengan jumlah populasi seluruhnya sebanyak 22.993 Kepala Keluarga.

Kesimpulan yang diperoleh dari kajian *Master Plan* Kemiskinan Kota Pangkalpinang yaitu Karakteristik Rumah Tangga Miskin Kota Pangkalpinang antara lain Kepala Keluarga didominasi laki-laki dengan rentang usia 36-43 tahun, pendidikan SMA dan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Dengan pekerjaan utama kepala keluarga terbanyak berada pada sektor informal yaitu sebagai buruh dan rentang pendapatan terbanyak Rp. 1.600.000-Rp. 2.000.000, sebagian besar atau 66 persen kepemilikan rumah sudah rumah sendiri. Korelasi umur kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga

berdasarkan kecamatan di Kota Pangkalpinang, bahwa terdapat 6 kecamatan (Kecamatan Bukit Intan, Gerunggang, Rangkui, Taman Sari, Gabek, Pangkal Balam) memiliki korelasi yang negative artinya pada usia diatas 55 tahun pendapatan tetap KK mengalami penurunan atau produktifitas KK dalam bekerja mengalami penurunan. Namun terdapat 1 kecamatan yang memiliki korelasi yang positif (Kecamatan Girimaya) artinya pada KK yang memiliki umur diatas 55 tahun penghasilan tetap KK mengalami peningkatan, hal ini menandakan KK pada usia di atas 55 Tahun masih produktif dalam bekerja. Korelasi total penghasilan dan pengeluaran KK berdasarkan kecamatan di Kota Pangkalpinang, semua kecamatan memiliki korelasi yang positif antara total penghasilan dan rata-rata pengeluaran KK artinya semakin tinggi total penghasilan yang diperoleh maka rata-rata pengeluaran KK juga akan mengalami peningkatan. Korelasi pendidikan dan penghasilan berdasarkan kecamatan di Kota Pangkalpinang, semua kecamatan memiliki korelasi yang positif antara pendidikan terakhir KK dan penghasilan KK artinya semakin tinggi pendidikan KK maka penghasilan yang diperoleh juga semakin tinggi. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro berdasarkan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Pangkalpinang. Kemudian melalui pendekatan mikro, kebijakan yang dapat dilakukan melalui penanggulangan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan Tahapan Kebijakan *Master Plan* Kemiskinan Periode 2024-2028 dimulai dengan pada Tahun 2024 yaitu dengan merumuskan indikator penduduk miskin dan membuat *one big data* penduduk miskin Kota Pangkalpinang yang dapat digunakan oleh semua OPD dan pihak, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan menyelenggarakan program paket A, paket B dan paket C, Meningkatkan fasilitas dan anggaran jaminan kesehatan, Perbaikan rumah Layak Huni, Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Pendataan UMKM Produktif dengan Modal Terbatas, Pelatihan Kewirausahaan dan Menjadi lansia Produktif, Asuransi Bagi Tenaga Kerja Sektor Nonformal (Pekerja Bangunan). Pada Tahun 2025 melalui Optimalisasi Lembaga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Program Paket A, B dan C, Optimalisasi Jangkauan Akses Jaminan Kesehatan, Perbaikan Rumah Layak Huni, Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Bantuan Permodalan dengan Kredit Bunga 0 persen Bagi pelaku UMKM, Penguatan Pelatihan Kewirausahaan dan

Spiritual Lansia Produktif. Pada Tahun 2026 melalui optimalisasi lembaga pendidikan nonformal serta melakukan kolaborasi dengan memberikan pelatihan keterampilan Perbaikan Rumah Layak Huni, Penambahan Jumlah UMKM Penerima Bantuan Permodalan dengan Bunga 0 persen, Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Terwujudnya Lansia Produktif. Pada Tahun 2027 setidaknya sebanyak 80 persen masyarakat penduduk miskin memperoleh akses pendidikan nonformal, paket A, B, C dan pelatihan keterampilan, 80 persen Rumah Perkecamatan Telah Layak Huni, Penambahan Jumlah UMKM Penerima Bantuan Permodalan dengan Bunga 0 persen, Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Terwujudnya Lansia Produktif. Pada Tahun 2028 setidaknya 80 persen masyarakat miskin memperoleh akses pendidikan nonformal, paket A, B, C, Rumah Masyarakat miskin Perkecamatan Telah Layak Huni, Penambahan Jumlah UMKM Penerima Bantuan Permodalan dengan Bunga 0 persen, Berkurangnya masyarakat miskin yang menghuni Rusunawa dan Terwujudnya Lansia Produktif. Berdasarkan hasil Peta Sebaran Jumlah Sampel Rumah Tangga DTKS di Kota Pangkalpinang dapat terlihat bahwa dari 7 kecamatan sebanyak 3 kecamatan yang memiliki pola persebarana rumah tangga miskin yang berkelompok yaitu Kecamatan Bukit Intan, Gabek dan Gerunggang, sedangkan sisanya 4 kecamatan memiliki pola persebaran rumah tangga miskin yang menyebar yaitu Kecamatan Girimaya, Pangkalbalam, Rangkui, Taman Sari.